



## OPD Diminta Serius Tangani Rekomendasi BPK

Sambas ○ Rabu, 14 November 2018 10:57



Berbincang: Bupati Sambas berbincang dengan Gubernur Kalbar saat bertemu di Aula BPK Perwakilan Pontianak, beberapa hari lalu.

Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajarannya menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikannya, setelah penandatanganan komitmen mendorong seluruh perangkat daerah melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang digelar di Ruang Pertemuan Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Pontianak, Senin (12/11).

"Apa yang dilakukan BPK RI, adalah langkah strategis. Penandatanganan komitmen ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan memperkuat upaya peningkatan pengelolaan

keuangan negara yang transparan dan akuntabel mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik," kata Bupati Sambas.

Ada sejumlah poin penting, yang harus dilakukan paska kegiatan tersebut. Di antaranya sebagai kepala daerah, dirinya akan terus mendorong OPD berbuat maksimal menindaklanjuti permasalahan tersebut. "OPD di Lingkungan Pemkab Sambas, akan didorong meningkatkan pola hubungan kerja yang lebih dengan inspektorat," katanya.

Selanjutnya, Inspektorat melakukan validasi secara periodik atas kemajuan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dari setiap OPD. "Inspektorat juga harus melaporkan perkembangan hasil penyelesaian tindak lanjut secara periodik pula. Karena sebagai Kepala Daerah diminta menetapkan tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan. Ini sebagai indikator kinerja utama pada masing-masing kepala OPD dalam rangka penilaian kinerja," katanya.

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalbar, Joko Agus Setyono. Juga hadir secara langsung, Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, dan Perwakilan Kajati Kalbar. Selain penandatanganan tersebut, kegiatan dirangkai dengan penyampaian materi Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel, yang menghadirkan Narasumber diantaranya Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Gubernur Kalbar, dari Kejaksaan Tinggi Kalbar dan dan Perwakilan Polda Kalbar.(fah)